

Model Manajemen Teknologi Komunikasi Dalam Pemerintahan dan Penanganan Bencana Alam

Edwi Arief Sosiawan, Arif Rianto Budi Nugroho, dan Susilastuti, D.N.
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Email:edwias@yahoo.com

Abstract

The local governments as the subject of studies were Sleman regency, municipality of Yogyakarta and Bantul regency, which implemented the management of information and communication technology (ICT). Three management agencies are responsible to the secretary of the district, but the authority to determine the policies is very different. In the other hand, the difference in the management of ICT was lack of standardization. The problem in this research is “How was ideal management model information communication technology used in support of government and natural disaster?” The method in this research was descriptive qualitative that give the pictures of the situation or event. Research showed that ICT management by institutions that support the system of government among the studied subjects have differences in implementation. The differences are derived from the laws and regulations. While recommendations for the agencies that manage ICT and disaster prevention activities is by adding Section Technology Affairs at BPBD organizational structure, which has two sections namely Section of Administrative Operations and Field Operations Section.

Abstrak

Pemerintah daerah yang diteliti yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta yang secara kelembagaan memiliki perbedaan dalam pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi (TIK).Ketiga lembaga pengelola bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, namun kewenangan dalam menentukan kebijakan sangat berbeda. Pada sisi lain, adanya perbedaan pengelolaan TIK terlihat kurangnya standardisasi dalam manajemen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana model manajemen teknologi komunikasi informasi yang ideal yang digunakan jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pemerintahan dan penanganan bencana alam?” Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil Penelitian menunjukkan manajemen TIK yang dilakukan oleh lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan diantara subjek yang diteliti memang memiliki perbedaan dalam implementasinya.Perbedaan tersebut bersumber dari penerjemahan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berbeda-beda di antara subjek yang diteliti.Rekomendasi lembaga yang mengelola TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana adalah dengan penambahan Bagian Urusan Teknologi di struktur organisasi BPBD, yang memiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Administrasi serta Seksi Operasional Lapangan.

Kata Kunci : Manajemen, Teknologi Komunikasi dan Informasi, sistem operasional Pemerintahan dan Penanggulangan Bencana

Pendahuluan

Manajemen teknologi komunikasi memiliki beragam arti dan makna dari berbagai sudut pandang. Namun ciri khas manajemen teknologi informasi: a) Terkoneksi, semua elemen organisasi akan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Batasan yang merintang akan mudah ditembus karena banyak *gadget* teknologi yang dimanfaatkan, b) Serba cepat, tidak perlu birokrasi yang berlama-lama. Melalui teknologi informasi birokrasi menjadi dipermudah, c) Terintegrasi. Semua elemen organisasi akan terintegrasi secara lebih mudah. Integrasi di sini dalam bentuk komunikasi, hubungan, dan seterusnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemkab Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki lembaga yang mengelola teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan penanggulangan bencana alam. Dalam tataran teknologi komunikasi yang digunakan dalam operasional pemerintahan semua pemerintah daerah yang diteliti telah memanfaatkan diversifikasi penggunaan teknologi komunikasi, mulai dari *fixed* telepon yang berstandar PABX hingga penggunaan varian media *online* yaitu internet dan intranet serta *video conference*.

Teknologi komunikasi yang digunakan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Tidak ada pemerintah daerah yang tertinggal oleh teknologi yang sedang berkembang saat ini, namun pemanfaatannya saja yang kurang optimal dilihat dari penggunaannya.

Dari sisi manajerial tampak bahwa lembaga yang mengelola teknologi komunikasi adalah lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan dengan tugas pokok melakukan analisis, perencanaan penggunaan, (*hardware*, *software* dan jaringan), merumuskan kebutuhan data dan informasi, serta membangun, mengembangkan, memelihara teknologi komunikasi, pengawasan dan pengendalian sistem informasi manajemen.

Lembaga tersebut memiliki tugas yang

sama, yang membedakan adalah penempatan serta keluasaan dalam pengelola. Masing-masing pemerintah daerah menerjemahkan sendiri lembaga yang mengelola teknologi komunikasi akibat adanya otonomi daerah yang memberi keluwesan menyusun organisasi pemerintahan. Semua ini memiliki alasan diantaranya adalah keluasaan dalam membuat kebijakan juga penyederhanaan untuk efisiensi roda pemerintahan.

Secara kelembagaan ada perbedaan dalam pengelolaan teknologi komunikasi pada masing-masing pemerintah daerah. Bila diperhatikan maka kesamaan dari tiga penda tersebut di atas adalah kedudukan organisasi yang mengelola teknologi komunikasi. Bila dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan (dari Pemerintah Pusat). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sementara Kantor merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sementara bagian (setda) bertugas membantu bupati/walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian ada perbedaan fungsi organisasi dalam pengelolaan teknologi komunikasi. Secara hierarkis ke tiga lembaga pengelola bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, namun kewenangan dalam menentukan kebijakan sangat berbeda. Pemkab Sleman menetapkan pengelola teknologi komunikasi dipimpin oleh eselon II yang memiliki kewenangan lebih luas namun

pelaksanaannya dibantu oleh kepala bagian. Artinya kebijakan disini adalah bersifat teknis dan tidak spesifik namun bagian dari kebijakan-kebijakan lainnya yang ada dalam kewenangan dinas tersebut. Sehingga pendanaan dalam upaya pengadaan dan pemeliharaan tidak terkonsentrasi di teknologi komunikasi saja.

Sementara Pemkab Bantul menyerahkan manajemen pengelolaan teknologi komunikasi kepada Kantor yang memiliki eselon III. Meskipun posisi eselonnya lebih rendah namun karena kantor lebih memiliki kewenangan yang spesifik maka kebijakannya pun tidak bersifat teknis saja namun juga non teknis. Dengan demikian maka pengelolaan teknologi komunikasi lebih luwes untuk dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan.

Sementara Pemkot Yogyakarta lebih menyerahkan kepada bagian dari sekretaris daerah yang tugasnya adalah pelayanan teknis dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam hal ini adalah walikota. Dengan demikian kebijakan terletak pada walikota dalam pengembangan teknologi komunikasi. Bagian TIT lebih berfungsi merealisasikan kebijakan serta pelayanan teknis untuk unsur organisasi lainnya yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta, pada sisi lain adanya perbedaan pengelolaan Teknologi Komunikasi terlihat kurang adanya standardisasi dalam manajemen sehingga *platform* antara kebutuhan teknologi komunikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak sejalan dengan kebijakan teknologi komunikasi di pemerintah daerah dalam pengembangan dan penataan dan penggunaannya.

Untuk lembaga organisasi yang menangani bencana alam tiga pemerintah daerah yang ada di wilayah provinsi DIY walaupun berbeda secara organisatoris namun memiliki fungsi yang sama dan berada pada organisasi teknis yang khusus menangani masalah yang spesifik. Dalam pengelolaan bencana alam masing-masing lembaga tersebut melalui kebijakan pimpinan daerah memiliki kewenangan yang luas dan mampu langsung mengakses ke wilayah publik

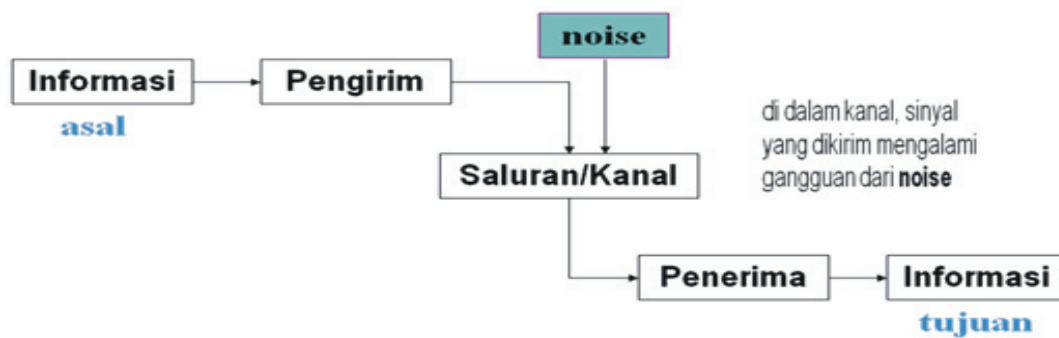
yang menjadi korban bencana atau masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Dengan demikian ketiga pemda tersebut telah memenuhi amanat UU 24/2007. Namun bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/2011 dalam membentuk badan atau institusi penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana model manajemen teknologi komunikasi informasi yang ideal yang digunakan jajaran Pemerintah Provinsi DIY dalam mendukung operasional pemerintahan dan penanganan bencana alam?"

Komunikasi Bermedia dan Model Komunikasi

Sistem komunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Informasi bisa berupa suara percakapan (*voice*), musik (*audio*), gambar diam (*photo*), gambar bergerak (*video*), atau data *digital*. Komunikasi bisa dilakukan di antara 2 atau lebih tempat yang berdekatan atau pun berjauhan. Sistem komunikasi umumnya mengacu pada pola komunikasi. Pola komunikasi di dalam suatu negara selalu dipengaruhi oleh sikap dan pandangan hidup bangsanya sekaligus memberikan bentuk bagi falsafah komunikasi yang dianut dalam proses interaksi antar orang yang terjadi di negara itu. Falsafah komunikasi yang dianut, pada umumnya sejalan dengan sistem politik yang berlaku.

Komunikasi mempunyai kemampuan menambah pengetahuan, mengubah dan memperkuat opini, mengubah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual maupun menambah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual maupun sosial. Keadaan ini mengharuskan adanya kesamaan pandangan antara supra dan infrastruktur politik dalam mengimplementasikan kegiatan komunikasi sesuai dengan falsafah bangsa itu sendiri. Secara diagramis maka sistem komunikasi dapat di lihat pada gambar 1.



Gambar 1. Blok Sistem Komunikasi

Informasi dikirim dari sumber informasi (asal) oleh pengirim melalui saluran komunikasi menuju penerima yang berada pada sisi tujuan informasi di dalam kanal, sinyal yang dikirim mengalami gangguan dari noise (Leksono, 2007:9)

Studi ilmu komunikasi men-dikotomikan media menjadi dua kategori yaitu; media nirmassa (telephone, surat, pamflet, booklet dan sebagainya) serta media massa (televise, radio, surat kabar dan sebagainya). Namun, eksplorasi penelitian media lebih banyak difokuskan pada media massa, karena tiga pertanyaan sentral yang berpengaruh dalam penelitian media yaitu asumsi-asumsi; a). Besarnya dampak/effek terhadap pengguna / komunikan / user media, b) Bagaimana komunikasi massa menggantikan tempat komunikasi interpersonal (yang lebih langsung), c). Terpaan media untuk masyarakat dan rincian pengaruh media terhadap kondisi psikologi, sosiologi dan budaya.

Alur taksiran eksplorasi penelitian media massa menurut Roger D. Wimmer dan Joseph R Dominick (1989: 5) terdiri dari 5 fase; fase media, fase penggunaan media, fase efek media, fase kemampuan media lebih, dan fase improvisasi media.

Dari taksiran eksplorasi media massa banyak lahir konsep-konsep atau teori-teori besar dalam Ilmu Komunikasi. Beberapa teori dalam ilmu komunikasi sebagian besar berawal dari penemuan konsep-konsep yang terjadi dalam komunikasi bermedia (*mediated communications*). *The bullet theory* atau teori

jarum hipodermik sebagai “the first and classical communication theory” hingga cultivation theory, dibangun berdasar pada fenomena-fenomena komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia pula menurut Rogers (1986) mendominasi kronologi proses komunikasi manusia melalui dinamisasi teknologi media komunikasi.

Komunikasi bermedia merupakan salah satu tipe komunikasi selain komunikasi secara intrapersonal, komunikasi interpersonal dan komunikasi publik. Eksistensi dan perkembangan komunikasi bermedia selalu sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dimulai dari penggunaan gambar sebagai simbol pesan pada dinding gua (peradaban prasejarah yang ditemukan di gua Lascaux Perancis disusul dengan papan pengumuman “*acta diurnal*” pada jaman Romawi yang melegenda, hingga penggunaan konvergensi teknologi digital pada jaman sekarang ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi manusia sehari-hari selalu berdampingan dengan penggunaan media sebagai sarana penyampai pesan dalam peningkatan kualitas hidup yang disesuaikan dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Awal dikonsentrasikannya media sebagai bahan kajian tersendiri dalam Ilmu Komunikasi adalah sejak disadarinya dampak atau efek dari pesan melalui media yang begitu besar terhadap komunikan / *audience* / massa, serta fungsi perannya bagi masyarakat luas (*audience*/komunikan).

Efek yang dimaksud diatas berbentuk respon positif maupun negatif sikap serta

perilaku dari komunikator atau *audience* yang menerima *exposure* media. Fungsi peranan media meliputi: fungsi sebagai pengantar/pembawa segenap macam pengetahuan, fungsi penyelenggaraan kegiatan publik dalam arti media mampu dijangkau masyarakat secara bebas, umum dan murah serta fungsi kemampuan menjangkau banyak orang dari pada institusi lain yang membawa pada kemampuan media untuk mengambil alih peranan institusi sosial lainnya (Mc Quail, 1994, 52).

Komunikasi bermedia identik sebagai komunikasi massa (*mass communication*) dengan penilaian melalui tinjauan dari segmen khalayak, medianya dan sifat pesannya. Dengan demikian komunikasi bermedia diartikan secara definitif sebagai proses komunikasi yang pesan-pesannya dikirim (*send*) secara massal kepada khalayaknya (*audience*) dari sumber yang melembaga melalui media/alat yang bersifat mekanis (Cangara, 1999: 35).

Adapun ciri-ciri komunikasi bermedia adalah terurai sebagai berikut: Pesan dalam komunikasi bermedia bersifat terbuka, umum dan variatif sesuai dengan sifat khalayak atau *audience* yang heterogen dan tersebar secara luas. Sumber pesan, juga komunikatornya adalah lembaga atau institusi yang terorganisir bukannya satu orang. Oleh karenanya proses penyampaian pesan lebih bersifat formal, terencana dan lebih rumit yang membawa pada konsekuensi pada mahalannya biaya proses produksi pesan serta diperlukannya personil yang mengelolanya. Sementara itu menurut Mc Quail (1994) pesan dalam komunikasi massa tidaklah unik, dapat diperkirakan (*predictable*) serta dapat distandardisasi.

Penyebarluasan pesan dalam komunikasi bermedia berlangsung cepat, serempak dan luas. Kemajuan teknologi yang semakin canggih telah membawa kepada semakin kuat dan luasnya *coverage area* media dalam menjangkau khalayaknya. Sifat pesan komunikasi bermedia berlangsung satu arah dengan *feedback* yang tertunda (*delayed*) dan terbatas karena adanya jarak tempat dan waktu. Hubungan yang terjadi

antara komunikator dan komunikand adalah bersifat non pribadi atau impersonal, yang timbul sebagai konsekuensi teknologi penyebaran yang masal dan syarat bagi peranan komunikator yang bersifat umum (objektif) (Effendy, 1981, 63).

Dalam membangun teori melalui komunikasi bermedia, tidak saja menghasilkan dan berupa *statement-statement* melainkan juga menggunakan model-model. Meskipun model-model tersebut tidak menguraikan deskripsi, prediksi dan eksplanasi tujuan area fokus pengamatan, tetapi model menyediakan hubungan antara komponen dalam proses komunikasi dan menerangkan bagaimana komponen tersebut beroperasi (Infante, 1990, 24).

Komponen-komponen model komunikasi kadang memiliki kesamaan fungsi namun berbeda dalam penamaan atau penyebutannya, sebagai contoh "*source*" dengan "*sender*" fungsi keduanya adalah sebagai komunikator tetapi penamaan serta artinya secara komprehensif berbeda. Dari berbagai model komunikasi yang ditemukan dan dihasilkan banyak terdapat berbagai istilah pada setiap komponen dalam model-model tersebut yang menjadi kekayaan eksplorasi komunikasi bermedia.

Konsep Manajemen dan Teknologi Komunikasi

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen menurut arti katanya adalah metode atau teknik untuk mengelola (mengatur) berbagai sumber daya supaya menjadi optimal untuk menghasilkan produk (barang, jasa, tujuan) tertentu. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Pada konteks lain manajemen didefinisikan sebagai: Proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan menggerakkan pada operasi organisasi, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memprakarsai dan mengendalikan operasi (Murdick 1993)

Selain itu Manajemen dari sudut pandang organisasi berarti suatu badan yang mengelola (mengatur) kegiatan apakah bisnis,

pemerintahan, industri, keuangan, dan lain lain. Dalam pengertian ini manajemen adalah sekelompok individu orang dengan apa yang ada padanya (jabatan, kapasitas, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan keahlian) dan yang telah diberi otoritas tertentu.

Titik singgung dari dua pengertian manajemen di atas terletak pada kata mengatur. Dalam setiap proses manajemen akan selalu melibatkan berbagai aspek, biasanya dituliskan dalam bentuk 5M yaitu *Man, Money, Material, Methods*, dan *Machine*. Lima aspek inilah yang tiap saat harus dikendalikan sehingga mencapai optimal, apakah dalam hal manfaat maupun keuntungan.

Pengelola manajemen adalah manusia dengan berbagai perangkatnya, berhasil atau tidak kembali ditentukan oleh niat dan usahanya. Oleh karena praktek manajemen harus dikelola dengan menyerap aspirasi serta budaya yang berkembang pada lokasi manajemen. Dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari suatu perusahaan ke perusahaan lain sedikit bervariasi. Tidak bisa dilakukan praktek manajemen secara *textbook thinking* untuk menghasilkan kinerja yang sama, karena dalam beberapa hal ternyata praktek manajemen cenderung kepada sesuatu yang bersifat seni (Art).

Orientasi manajemen yang paling pokok adalah pada efektivitas hasil dari proses manajemen, untuk itu metode yang dipakai dapat sedikit bervariasi tergantung pada obyek manajemen, yang penting tidak terlalu melenceng jauh dari teori. Di dalam pemerintahan dikenal istilah Pamong Praja, artinya secara filosofi adalah pengurus wilayah dan warga.

Dalam konsep ini aparat pemerintah adalah Pelayan Rakyat dan Instrumen Negara yang berfungsi untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang. Oleh karena memposisikan diri sebagai pelayan maka aparat akan bekerja keras supaya rakyat menjadi puas, karena paham bahwa yang menggaji mereka adalah rakyat. Konsep ini sangat sederhana serta mudah untuk dilaksanakan, tetapi

sangat berat untuk dipraktekkan oleh personil yang berada di posisi manajemen pemerintahan. Manajemen Pamong adalah praktek manajemen yang mengedepankan empati dan pengorbanan serta tujuan mulia, sehingga hasilnya adalah efektivitas maksimal.

Dalam manajemen pamong berlaku pepatah, kalau menjadi pemimpin ikan, jadilah ikan juga dan mau ikut hidup di air, supaya komunikasi dapat selalu dimengerti dua belah pihak serta hubungan personal menjadi sangat erat dan menyatu. Secara struktural seperti hubungan antara orangtua dan anak, orangtua lah yang mengasuh anak bukan sebaliknya. Pemimpin manajemen tinggilah yang bekerja paling keras dibandingkan manajemen di bawahnya. Jika pemimpin manajemen dapat memberikan Visi, Inspirasi, dan Spirit yang jelas serta positif maka anak buah akan bersedia secara ikhlas

Fungsi Manajemen

Fungsi Manajemen ialah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak sekali ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen ini. Perencanaan (*Planning*) ialah fungsi manajemen yang harus bisa menjawab rumus 5W-1H. WHAT (apa) yang akan dilakukan, WHY (mengapa) harus melakukan apa, WHEN (kapan) melakukan apa, WHERE (dimana) melakukan apa, WHO (siapa) yang melakukan apa, HOW (bagaimana) cara melakukan apa, Pengorganisasian (*Organizing*) ialah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab pada siapa.

Penggerakkan (*actuating*) yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara menggerakkan kerabat kerja (bawahan) agar bekerja dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Sementara Pengawasan (*Controlling*) disebut juga fungsi pengendalian. Suatu proses untuk mengukur atau membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan ini,

diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan.

Disamping itu, *Forecasting* (Peramalan) sering dijadikan bahan pertimbangan. *Forecasting* ialah kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Bila dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan manajemen, maka fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan, ini adalah fungsi-fungsi ke dalam perusahaan, sedangkan fungsi manajer ke luar perusahaan adalah ;(a)mewakili perusahaan dibidang pengadilan; (b) ambil bagian sebagai warga negara biasa; (c) mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat.

Daft (2003:6) membagi manajemen menjadi empat fungsi saja berikut penjelasannya; (a) *Planning* merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pendefinisian sasaran untuk kinerja organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya-sumber daya yang digunakan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut; (b) *Organizing* merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen-departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen; (c) *Leading* fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh utk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi; (d) *Controlling* fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas karyawan menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yg sesuai dgn sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Pada hakekatnya fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa penulis dapat dikombinasikan menjadi 10 fungsi, yaitu, (1) *Forecasting* (ramalan), memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan; (2) *Planning* (perencanaan), menentukan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan; (3) *Organizing* (organisasi), mengelompokkan

kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya; (4) *Staffing* atau *Assembling Resources* (penyusunan personalia), menyusun personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi; (5) *Directing* atau *Commanding* (pegarahan atau mengkomando), usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan (delegasi wewenang) untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; (6) *Leading*, pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; (7) *Coordinating* (koordinasi), menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling lempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan; (8) *Motivating* (motivasi), memberikan semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela; (9) *Controlling* (pengawasan), menemukan dan menerapkan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan; (10) *Reporting* (pelaporan), menyampaikan hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan.

Manajemen Teknologi Komunikasi dan Informasi

Manajemen Teknologi Informasi adalah kombinasi dari manajemen teknologi dan teknologi informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan penggunaan komputer. Dari definisi tersebut, manajemen teknologi informasi mengandung arti pertama berarti manajemen dari sekumpulan beberapa sistem, infrastruktur, dan informasi yang terkandung di dalamnya. Arti lainnya adalah bahwa manajemen teknologi informasi merupakan sebuah fungsi bisnis. Dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem informasi suatu organisasi secara tepat dengan mempertimbangkan biaya yang wajar

untuk mendapatkan manfaat yang optimal, maka informasi akurat, tepat waktu dan relevan yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Tujuan dari manajemen teknologi komunikasi dan informasi adalah ; (a) Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan; (b) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Lebih jauh lagi maka terdapat dua komponen dalam manajemen teknologi komunikasi dan informasi yaitu, *Pertama*, Komponen Sistem Informasi Manajemen Secara Fungsional, merupakan seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, meliputi; (a) Sistem Administrasi dan Operasional, melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi dan sebagainya dimana telah ditentukan prosedur-prosedurnya dan sistem ini harus diteliti terus menerus agar perubahan-perubahan dapat segera diketahui; (b) Sistem Pelaporan Manajemen, berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan atau manajer; (c) Sistem Database, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, dimana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah; (d) Sistem Pencarian, berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur; (e) Manajemen Data, berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi.

Kedua, Komponen Sistem Informasi Manajemen Secara Fisik, Komponen Sistem

Informasi Manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi; (a) Perangkat keras seperti, komputer (CPU, Memory), pesawat telepon, peralatan penyimpan data (Decoder); (b) Perangkat lunak, yang umum untuk pengoperasian dan manajemen data, program aplikasi, *database*, file-file tempat penyimpanan data dan informasi; (c) Media penyimpanan seperti pita komputer, paket piringan; (d) Prosedur pengoperasian, Instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan, instruksi penyiapan data sebagai input, Instruksi operasional; (e) Personalia pengoperasian, operator, programmer, analisa system, personalia penyiapan data, koordinator operasional SIM dan pengembangannya.

Bencana Alam dan Penanganannya

Bencana adalah sesuatu yang tak terpisahkan dalam sejarah manusia. Manusia bergumul dan terus bergumul agar bebas dari bencana (*free from disaster*). Dalam pergumulan itu, lahirlah praktek mitigasi, seperti mitigasi banjir, mitigasi kekeringan (*drought mitigation*), dan lain-lain. Di Mesir, praktek mitigasi kekeringan sudah berusia lebih dari 4000 tahun. Konsep tentang sistim peringatan dini untuk kelaparan (*famine*) dan kesiapsiagaan (*preparedness*) dengan lumbung raksasa yang disiapkan selama tujuh tahun pertama kelimpahan dan digunakan selama tujuh tahun kekeringan sudah lahir pada tahun 2000 BC, sesuai keterangan kitab Kejadian, dan tulisan-tulisan Yahudi Kuno. Konsep manajemen bencana mengenai pencegahan (*prevention*) atas bencana atau kutukan penyakit (*plague*), pada abad-abad *non*-peradababan selalu diceritakan ulang dalam ‘simbol-simbol’ seperti kurban, penyangkalan diri dan pengakuan dosa. *Early warning* kebanyakan didasarkan pada Astrologi atau ilmu Bintang.

Persiapan bencana adalah satu set doktrin untuk menyiapkan masyarakat untuk

menghadapi bencana alam atau buatan-manusia. Pertolongan bencana adalah sub-himpunan dari doktrin ini yang berpusat pada usaha pertolongan. Hal ini biasanya adalah kebijakan pemerintah diambil dari pertahanan sipil untuk menyiapkan masyarakat sipil persiapan sebelum bencana terjadi. Artikel ini mencakup kesiapan sipil dan pribadi, karena mereka bekerja sama. Namun, kesiapan sipil jauh lebih murah dan lebih berguna, meskipun lebih sulit direncanakan. Berhadapan dengan bencana ada empat kegiatan; (a) mitigasi, mencoba mencegah bencana terjadi atau mengurangi efek dari bencana; (b) kesiapan, kesiapan pemerintah untuk memiliki sebuah pusat operasi darurat, dan berlatih doktrin yang tersebar-luas untuk mengatur keadaan darurat; (c) tanggapan, Kota harus memiliki rencana untuk menyelamatkan warganya, dan merencanakan pelayanan darurat; (d) penormalan kembali, membutuhkan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, dan mengembalikan orang-orang ke pekerjaannya masing-masing. sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Persiapan_bencana#Mitigasi diakses tanggal 2 September 2011)

Terkait dengan penanganan bencana alam maka dikenal konsep manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Manajemen resiko tradisional terfokus pada resiko-resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum).

Sasaran dari pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang

yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan risk manajemen melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi). Dalam perkembangannya Risiko-resiko yang dibahas dalam manajemen risiko dapat diklasifikasi menjadi Risiko Operasional, Risiko Hazard, Risiko Finansial dan Risiko Strategik

Metode Penelitian

Pemilihan Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk membuat gambaran masalah mengenai situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini memaparkan fakta-fakta untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Moh Nazir (1985:64) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan pada lembaga pengelola teknologi komunikasi baik untuk operasional pemerintahan maupun bencana alam. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan interpretasi masing-masing Pemda terhadap Peraturan Pemerintah PP No. 8 Tahun 2003, Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, PP 41/2007 serta Permendagri 57/2007.

Penggunaan dan Manajemen TIK adalah aktivitas yang cenderung kearah publikasi elektronis dan meninggalkan pelayanan secara analog (non elektronik). Kehadiran TIK yang memunculkan media *online* menyebabkan perlunya eksekutif dan organisasi yang menangani manajemen secara keseluruhan pada tingkat

tertinggi. Manajemen TIK pemda akan lebih baik dan lebih lugas jika terdapat keterpaduan dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemda. Di dalam strategi pemanfaatan TIK penting untuk memastikan bahwa berbagai tugas manajemen yang diperlukan bagi pengelolaan TIK yang efektif telah teridentifikasi, dan tanggungjawab pelaksanaan telah teralokasi serta dipahami dengan jelas.

Pada skala kecil mungkin hanya diperlukan satu orang sebagai penanggungjawab untuk menangani persoalan strategik dan implementasi praktis TIK suatu pemda, namun adanya kompleksitas pada publikasi secara elektronik melalui media *online*, dan bertambahnya kepentingan pemda kabupaten dan kota untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka diperlukan adanya persyaratan standar struktur organisasi yang akan menjadi pegangan bagi penanggungjawab TIK di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

Secara standar baku yang merujuk pada Panduan Pengelolaan Egovernment yang dikeluarkan oleh Depkominfo pada tahun 2003 maka ada dua tugas lembaga pengelola TIK. *Pertama*, Tim Pengelola adalah sejumlah pegawai Pemda yang mampu, serta mempunyai standar kompetensi di bidang teknologi informasi, yang memiliki tugas sebagai berikut; (1) Menentukan spesifikasi teknis yang mendukung pencapaian tujuan pembuatan situs web, termasuk spesifikasi persyaratan server, spesifikasi disain situs web secara keseluruhan, pemeliharaan, dan persyaratan keamanan (*security*); (2) Melakukan tugas operasional situs, pemantauan dan pemeliharaan standar-standar situs web dan pemutakhiran informasi situs web, serta memastikan situs web selalu dapat diakses; (3) Bertanggungjawab dalam pemasukan data yang telah disiapkan dan diverifikasi oleh Tim Asistensi. *Kedua*, Tim Asistensi adalah Para eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural pemda, mewakili unit-unit kedinasan yang ada di daerah. Tim asistensi bertugas menyediakan dan memverifikasi data dari masing-masing unit-unit kedinasan untuk

dapat dipublikasikan pada situs web.

Merujuk pada ke empat aturan yang tersebut di atas yaitu Peraturan Pemerintah PP No. 8 Tahun 2003, Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, peraturan pemerintah PP 41/2007 serta Permendagri 57/2007, maka secara ideal organisasi pengelola TIK adalah Lembaga teknis daerah. Lembaga Teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten, atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih jauh lagi Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yang memiliki fungsi, antara lain; (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; (b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kebutuhan akan penyelenggaraan TIK adalah kebutuhan yang bersifat spesifik dan membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang spesifik dan detail. Oleh karena itu maka rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah Lembaga atau organisasi pengelola TIK untuk pemkab maupun pemkot adalah berbentuk Kantor yang dipimpin oleh Kepala Kantor. Secara logis pemilihan bentuk Kantor sebagai lembaga teknis pengelola TIK adalah; (1) Kebutuhan akan penyelenggaraan TIK dalam



Gambar 2. Susunan Organisasi Pengelola TIK

suatu pemda adalah selaras dengan visi misi pemda, yang implementasinya juga berkaitan erat dengan visi dan misi serta kebijakan Kepala Daerah. Secara pragmatis hal ini sudah terbukti bahwa Kepala Daerah yang memiliki *concern* yang tinggi terhadap pengembangan dan penggunaan TIK maka pemda yang dipimpinnya memiliki kualitas yang baik dalam penggunaan dan pengembangan TIK. Oleh karena itu perlu adanya pola hubungan yang pendek secara hierarkis antara pemegang kebijakan dengan pelaksana teknis, karenanya mengapa bentuk kantor ini lebih direkomendasikan; (2) Perkembangan TIK yang begitu cepat dalam *software* dan *hardware* secara signifikan memerlukan keputusan yang cepat dalam keputusannya, oleh karena itu sejalan dengan *point* di atas bentuk kantor akan lebih memudahkan dalam memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk menggunakan dan mengembangkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan masing-masing pemerintah daerah; (3) Penggunaan dan pemeliharaan TIK adalah berbeda dengan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya bahkan cenderung spesifik dan khusus. Dibutuhkan beberapa sumber daya manusia yang memiliki *skill* dibidang yang khusus tersebut yang bernaung di bawah organisasi atau lembaga yang spesifik juga. Oleh karena itu bentuk Kantor yang memiliki kespesifikan dalam tugas dan fungsinya adalah penting agar pemeliharaan dan penggunaannya dapat terjaga secara simultan serta kerahasiaan data dapat terjaga.

Lembaga teknis yang berbentuk kantor tersebut dapat disusun berdasarkan struktur organisasi seperti gambar 2. Dari Struktur di atas dapat dideskripsikan tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang ketatausahaan dan administrasi, yang meliputi; (a) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, penyusunan program serta administrasi kepegawaian; (b) Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan Kantor; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Kantor; (d) Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki kantor

Seksi Manajemen Sistem Informasi

Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik dibidang manajemen sistem informasi. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai beberapa fungsi yaitu; (a) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dan operasional manajemen sistem informasi; (b) Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang sistem informasi; (c) Pelaksanaan kerjasama teknik

bidang teknologi informasi serta pengelolaan dan pengembangan multimedia khususnya sinkronisasi serta keterhubungan sarana dan prasarana TIK; (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan, penerapan manajemen sistem informasi.

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang pendayagunaan Sistem Informasi; Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai fungsi; (a) Pelaksanaan dan penyusunan Rencana Teknis pendayagunaan Sistem Informasi, mulai dari riset, penyediaan perangkat lunak dan keras serta koordinasi; (b) Pelaksanaan Pendayagunaan sistem informasi kepada semua personil yang ada di SKPD pemda; (c) Pelaksanaan dan penyusunan rencana Induk Kegiatan dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi; (d) Pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pendayagunaan sistem informasi; (e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan sistem informasi.

Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok yang penting di Kantor Pengolahan Data Elektronik karena bertanggung jawab terhadap penerapan sistem aplikasi program dan software serta pengembangannya. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi; (a) Menyusun pedoman kerja tentang standar, prosedur pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan informasi/telematika mencakup perangkat keras dan perangkat lunak; (b) Melakukan survei dan identifikasi sistem aplikasi yang akan dikembangkan agar efektif dan efisien; (c) Melakukan riset dan uji coba penerapan sistem aplikasi dan informasi/telematika guna penyempurnaan sistem aplikasi; (d) Melaksanakan pengembangan sistem aplikasi data dan informasi/telematika guna peningkatan

kinerja; (e) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan sistem aplikasi dan informasi/telematika di kabupaten/kota; (f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur sistem aplikasi telematika lingkup SKPD kabupaten/kota; (g) Mengelola aktivitas serta keluar masuknya informasi Website Pemerintahan kabupaten/kota; (h) Mengelola *e-mail* serta distribusi *e-mail* Pemerintahan kabupaten/kota.

Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang pembangunan dan pengembangan telematika. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Telematika mempunyai fungsi; (a) Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengembangan telematika; (b) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi/telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan; (c) Pelaksanaan pengkajian dibidang telematika; (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dibidang telematika; (e) Melaksanakan penyediaan dan pengambilan database untuk keperluan pelaksanaan berbagai aplikasi TIK di lingkungan pemerintah daerah. Untuk penamaan lembaga yang mengelola TIK dapat menggunakan istilah yang selama ini sudah ada seperti kantor Telematika, Kantor Pengelola data dan telematika, Kantor Teknologi Komunikasi dan Informasi. Namun secara parsimonial dalam penelitian ini lebih mengusulkan menggunakan nama kantor Telematika.

Model Manajemen Teknologi Komunikasi Penanggulangan Bencana

Penanganan bencana alam secara komprehensif dan jelas telah diatur dalam pasal 5 bab 3 UU 24/2007 tentang Bencana Alam. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya pengurangan resiko bencana

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini menjadi relevan apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintah yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk didalamnya melakukan upaya dampak terhadap resiko bencana. Hal ini merupakan amanat 2 (dua) aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan seharusnya memiliki kepekaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, utamanya pada saat sebelum terjadinya bencana yaitu pengurangan resiko bencana yang bertumpu pada 3 (tiga) faktor yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk melakukan langkah yang konkrit dalam melindungi masyarakatnya apabila terjadi kondisi kedaruratan, karena lokus dari bencana berada pada wilayah kerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Langkah konkrit dalam pengurangan resiko bencana di daerah adalah membangun kesiapsiagaan aparat bersama-sama masyarakat menuju terwujudnya budaya siaga bencana melalui rencana aksi daerah dalam pengurangan resiko bencana. Dalam rangka membangun kesamaan gerak dan langkah pengurangan resiko bencana, diperlukan peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah yang berpijak kepada penguatan kebijakan, prosedur, personil dan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) diarahkan untuk mendorong pembentukan BPBD di kabupaten/kota dan peningkatan status hukum/aturan perundang-undangan di daerah terkait kelembagaan BPBD tersebut.

Pada pasal 18 disebutkan bahwa untuk setingkat pemerintah daerah kota/kabupaten maka lembaga yang menangani adalah Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD). BPBD secara organisatoris dipimpin oleh

pejabat setingkat dibawah bupati/walikota atau eselon II^a. Dalam kaitan ini maka sesuai dengan pedoman pembentukan BPBD yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 3 tahun 2008 maka BPBD terdiri dari; *Pertama*, Kepala BPBD, posisi kepala BPBD sesuai dengan pedoman pembentukan BPBD adalah dilakukan dan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Daerah. Beberapa tugas kepala BPBD adalah; (a) *Mengkoordinasikan penyusunan program BPBD dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah dan kondisi obyektif serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* (b) *Merumuskan kebijakan teknis inovasi dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;* (c) *Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dan memberikan rekomendasi dan atau perizinandibidang Penanggulangan Bencana;* (d) *Merumuskan perencanaan kebijakan kerjasama penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah lainnya;* (e) *Membuat peraturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sarana pencegahan ancaman atau bahaya bencana;* (f) *Merumuskan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang berlebihan.*

Kedua, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, memiliki tugas pokok yaitu; (a) *Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;* (b) *Pemantauan penanggulangan bencana;* (c) *Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.* *Ketiga*, Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, memiliki tugas pokok yaitu; (a) *Pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansivertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;* (b) *Pengkomandoan penerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik darisatuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerahserta langkah-*

langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; (c) Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasikan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara kelembagaan maka apa yang sudah dituangkan dalam UU no 24/2007 tentang penanggulangan bencana, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang menangani aktivitas penanggulangan bencana alam adalah sudah ideal untuk dilakukan mengingat bahwa penanggulangan bencana alam memerlukan tindakan dan kebijakan yang bukan saja cepat dan tepat juga memerlukan alur kebijakan yang luas. Sejalan dengan logika pada manajemen TIK di atas maka pembentuk badan sebagai lembaga yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana alam sudah tepat dilakukan oleh semua pemda.

Menilik pada susunan organisasi BPBD di atas maka dapat dilihat bahwa tidak ada bidang yang menangani langsung terhadap pemanfaatan TIK untuk keperluan penanggulangan bencana alam. Dari hasil FGD (Focus Group Discussion) merekomendasikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan TIK harus dibedakan antara TIK untuk operasional Pemerintahan dan Penanggulangan Bencana adalah berbeda atau dibedakan baik perangkat keras dan lunaknya serta pengelolaannya. Meskipun begitu dalam FGD direkomendasikan bahwa penggunaan TIK tetap terintegrasi dengan TIK yang digunakan dalam sistem operasional pemerintahan.

Dari pertimbangan melalui FGD tersebut maka penelitian ini merekomendasikan susunan BPBD perlu ada tambahan bagian yang mengelola TIK untuk penanggulangan bencana alam. Bagian yang mengelola TIK tersebut disebut dengan Bagian Urusan Teknologi yang memiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Administrasi serta Seksi Operasional Lapangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bagian Urusan Teknologi secara umum adalah sebagai berikut; (a) Penyusunan rencana kerja Bidang Bantuan TIK; (b) Penyiapan kebijakan teknis penggunaan TIK untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; (c) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penggunaan dan pemanfaatan TIK dalam operasi pencegahan dan penanggulangan bencana; (d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Bantuan TIK

Sedangkan dalam detail tugas yang terdiri dua seksi maka dapat diuraikan sebagai berikut; *Pertama*, Seksi Operasional Administrasi, memiliki tugas sebagai berikut: penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Administrasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis alur SOP pemanfaatan dan penggunaan TIK untuk penanggulangan bencana, penyelenggaraan dan pengawasan serta pemeliharaan peralatan TIK yang berada di homebase BPBD, pengoordinasian operasional penanggulangan bencana serta pemantauan bencana melalui TIK yang ada di home base BPBD, penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pemanfaatan dan penggunaan TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional administrasi TIK.

Kedua, Seksi Operasional Lapangan, memiliki tugas sebagai berikut : penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Lapangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan dan penyediaan sarana TIK untuk pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan dan pengoordinasian pemanfaatan dan penggunaan TIK dilapangan pada saat pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan pengembangan TIK yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana TIK yang digunakan untuk penanggulangan bencana, penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyebaran informasi pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan komunikasi selama penanggulangan bencana, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Lapangan.

Kesimpulan

Manajemen TIK yang dilakukan oleh lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan diantara subjek yang diteliti memang memiliki perbedaan dalam implementasinya, perbedaan tersebut bersumber dari penerjemahan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berbeda-beda di antara subjek yang diteliti. Perbedaan secara organisatoris atas kelembagaan yang berwenang mengelola terjadi disebabkan adanya penerjemahan yang berbeda atas PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Perbedaan dalam penentuan tentang siapa pengelola TIK menjadi berbeda juga karena penerjemahan yang berbeda atas Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pada UU ini memang tidak secara jelas disebutkan siapa pengelola teknis dari TIK yang ada di setiap Pemda, bahkan pada peraturan yang lebih teknis yaitu PP 41/2007. Peraturan yang akhirnya juga membuat perbedaan lembaga pengelola TIK adalah Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Keempat undang-undang dan peraturan di atas itulah yang menyebabkan masing-masing pemda menerjemahkan sendiri-sendiri struktur organisasi pengelola TIK sebagai pendukung operasionalisasi sistem pemerintahan yang lebih didasarkan pada karakteristik masing-masing pemda secara otonomi.

Untuk lembaga organisasi yang menangani masalah bencana alam masing-masing pemda yaitu Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul serta Pemkab Sleman walaupun

berbeda namun memiliki eselon yang sama dan sama-sama berada pada organisasi teknis yang khusus menangani masalah yang spesifik. Sehingga dalam pengelolaan bencana alam masing-masing lembaga tersebut melalui kebijakan pimpinan daerah memiliki kewenangan yang luas dan mampu langsung mengakses ke wilayah publik yang menjadi korban bencana atau masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Artinya, ke tiga subjek pemda yang diteliti telah memenuhi amanat UU 24/2007 dan Permendagri Nomor 46/2008 dalam membentuk badan atau institusi penanggulangan bencana daerah.

Untuk model manajemen TIK ideal yang digunakan dalam operasional pemerintahan maka dalam penelitian ini merekomendasikan merujuk pada pembentukan lembaga teknis daerah. Lembaga Teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten, atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Lembaga atau organisasi pengelola TIK untuk pemkab maupun pemkot yang direkomendasikan adalah berbentuk Kantor yang dipimpin oleh Kepala Kantor. Untuk penamaan lembaga yang mengelola TIK dapat menggunakan istilah yang selama ini sudah ada seperti kantor Telematika, Kantor Pengelola data dan telematika, Kantor Teknologi Komunikasi dan Informasi. Namun secara parsemoni dalam penelitian ini lebih mengusulkan menggunakan namakantor Telematika. Untuk rekomendasi lembaga yang mengelola TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana maka dalam penelitian ini merekomendasikan adanya penambahan Bagian Urusan Teknologi di struktur organisasi BPBD, yang memiliki dua seksi yaitu *Seksi Operasional Administrasi* serta *Seksi Operasional Lapangan*.

Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan penelitian ini banyak didukung berbagai pihak oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan dan terima

kasih kepada Dekan FISIP UPNVY, Ketua Prodi Komunikasi UPNVY, Kepala BAPPEDA Provinsi DIY, Kepala Dinas perijinan Pemkot Yogyakarta, Kepala BAPPEDA Pemkab Sleman, Kepala BAPPEDA Pemkab Bantul, DP2M yang membiayai penelitian.

Daftar Pustaka

- Infante, Dominic A, 1990, *Building Communication Theory*, Illinois: Waveland Press
- Cangara, Hafied, 1999, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press
- Chairil N. Siregar, 2007, *Ketidakseimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam*, Jurnal Sositologi Edisi 10 Tahun 6
- Effendy, Onong Uchyana, 1999, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mc Quail Denis, 1987, *Teori Komunikasi massa*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mulyana, Deddy, 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Rosda Karya, Bandung
- Nasir, Mohammad, 1985, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya
- Leksono, Nonot, 2007, *Komunikasi Efektif*, Bandung: Rosda Karya
- Mc Quail Denis, 1994, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- PP no 21 tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*
- PP no 22 tahun 2008 tentang *Pendanaan Penanggulangan Bencana*
- PP no 23 tahun 2008 tentang *Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana*
- Permendagri Nomor 21/2011 tentang *pembentukan Badan penanggulangan Bencana alam daerah*
- Rakhmat, Jalaludin, 1997, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: CV Rosda Karya
- Rogers, Everett M, 1996, *Communications Technologie*, The Free Press Collier Mc Millan Publishing, London
- Sosiawan, Edwi Arief, 2008, *Model manajemen Komunikasi Front Office E-Government Sebagai Media Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, UPNVY
- Thurlow, Crispin etc, 2008, *Computer Mediated Communication*, Sage Publications, California
- Undang Undang no 24 tahun 2007 tentang *penanggulangan bencana alam*
- Wimmer, Roger D, Dominick, Joseph, 1983, *Mass Communication Research*, Wadsworth Publishing, California, USA
- PP No. 8 Tahun 2003 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*
- Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang *otonomi daerah*
- Undang Undang no 24 tahun 2007 tentang *penanggulangan bencana alam*
- Permendagri 57/2007 tentang *Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*
- Permendagri Nomor 21/2011 tentang *pembentukan Badan penanggulangan Bencana alam daerah*
- Permendagri Nomor 46/2008 tentang *pembentukan Badan penanggulangan Bencana alam daerah*